

Sinergitas TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI dalam Rangka Menghadapi Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II

Benie Hermawan^{1*}, Jales Jamca Jayamahe², Didi Efendi²

^{1,2,3}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: benzdoc51.bh@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-01	<p>Indonesia, as an archipelagic country located between the Indian Ocean and the Pacific Ocean, and bordered by Asia and Australia, holds a strategic position that makes it a key international trade route. However, this location also presents threats to maritime security and sovereignty, such as smuggling and territorial violations. One area with high vulnerability is the Indonesian Archipelagic Sea Lane II (IASL II), which is an important global shipping lane. This study aims to analyze the synergy between the Indonesian Navy and the Indonesian Maritime Security Agency in addressing threats in IASL II. The research method used is a descriptive approach with a SWOT analysis to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the collaboration between the two agencies. Data was obtained through document studies and reports on joint patrols, information exchange, and personnel training. The results show that the synergy between the Indonesian Navy and Indonesian Maritime Security Agency has led to cooperation such as joint patrols and operational coordination, which have positively impacted maritime security. However, challenges such as overlapping authority, limited resources, and differences in command systems hinder operational effectiveness. The SWOT analysis highlights strengths in the operational capabilities of both agencies, while opportunities lie in national policy support and advancements in maritime technology. A strong and sustainable synergy is key to maintaining Indonesia's maritime stability in the IASL II region.</p>
Keywords: <i>Synergy;</i> <i>Indonesian Navy;</i> <i>Indonesian Maritime Security Agency;</i> <i>Maritime Security;</i> <i>IASL II.</i>	
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-01	Abstrak <p>Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta diapit oleh Asia dan Australia, memiliki posisi strategis yang menjadikannya jalur perdagangan internasional. Namun, letak ini juga menghadirkan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan maritim, seperti penyelundupan dan pelanggaran wilayah. Salah satu kawasan dengan kerawanan tinggi adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), yang merupakan jalur pelayaran global penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI dalam menghadapi ancaman di ALKI II. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kerja sama kedua lembaga. Data diperoleh melalui studi dokumen dan laporan terkait patroli bersama, pertukaran informasi, serta pelatihan personel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI telah menghasilkan kerja sama seperti patroli gabungan dan koordinasi operasi yang berdampak positif terhadap keamanan maritim. Namun, kendala seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sarana, dan perbedaan sistem komando menghambat efektivitas operasional. Analisis SWOT mengungkapkan kekuatan pada kemampuan operasional kedua lembaga, sementara peluang ada pada dukungan kebijakan dan kemajuan teknologi maritim. Sinergi yang kuat dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas maritim Indonesia di ALKI II.</p>

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta diapit oleh dua benua, Asia dan Australia (Listiyono *et al.*, 2021). Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang penting sekaligus sebagai negara dengan potensi

sumber daya laut yang besar, baik di permukaan maupun di dasar laut (Arif and Kurniawan, 2018). Wilayah laut Indonesia tidak hanya menjadi koridor logistik global yang dilalui kapal dari berbagai negara besar, tetapi juga menyimpan kekayaan sumber daya alam yang signifikan (Chairil, 2024). Meskipun demikian, keterbukaan wilayah maritim ini menimbulkan

risiko terhadap keamanan dan kedaulatan negara, termasuk ancaman kejahatan lintas negara, pelanggaran yurisdiksi asing, serta praktik ilegal seperti penangkapan ikan secara tidak sah (Corporation, 2018).

Salah satu jalur laut yang memiliki nilai strategis tinggi adalah ALKI II, yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik (Hidayat *et al.*, 2025). Jalur ini merupakan bagian dari sistem navigasi laut yang diakui secara internasional melalui hukum laut, namun pengakuan tersebut tidak menjamin keamanan wilayah secara otomatis (Arifansyah, 2024). Data dari TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dan media nasional menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, ALKI II menghadapi berbagai bentuk kejahatan maritim, seperti perompakan, penyelundupan narkotika, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan jalur pelayaran. Meskipun sebagian besar kasus berhasil ditangani dengan tingkat keberhasilan tinggi, keberulangan kasus dan munculnya jenis pelanggaran baru menunjukkan kompleksitas ancaman yang terus berkembang, yang tidak hanya berdampak pada aspek militer tetapi juga ekonomi, lingkungan, dan hubungan antarnegara (Chairil, 2024).

Dalam menghadapi ancaman yang multidimensional ini, sinergi antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI menjadi sangat penting (Hidayat *et al.*, 2025). TNI Angkatan Laut bertugas menjaga pertahanan maritim dan kedaulatan negara dari ancaman militer, sementara BAKAMLA RI memiliki peran utama dalam pengawasan hukum dan keselamatan laut sipil (Arifansyah, 2024). Kolaborasi antara kedua lembaga mencakup patroli bersama, penindakan pelanggaran hukum, pertukaran informasi, serta pelatihan personel untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi ancaman maritim yang semakin kompleks. Sinergi ini tidak hanya memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di ALKI II, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas kawasan, kelangsungan ekonomi maritim, dan kedaulatan negara (Chairil, 2024).

Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergitas TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI dalam menghadapi ancaman keamanan maritim di ALKI II (Hidayat *et al.*, 2025). Pendekatan penelitian menggunakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi sinergi kedua lembaga, serta

menggunakan pemodelan struktural interpretatif untuk memetakan hubungan antarstrategi serta menentukan prioritas pelaksanaan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan model strategi sinergi yang komprehensif, terstruktur, dan realistik, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merancang kebijakan keamanan maritim nasional yang adaptif dan efektif dalam menghadapi ancaman maritim yang terus berkembang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sinergitas TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI dalam menghadapi ancaman keamanan maritim di ALKI II (Suryo, 2021). Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan data dan pemetaan kondisi nyata di lapangan, tanpa melakukan intervensi terhadap objek penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang terjadi (Setiawan, 2019).

Data penelitian dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur, termasuk laporan resmi TNI Angkatan Laut, BAKAMLA RI, serta informasi dari media nasional yang kredibel. Data yang dikumpulkan meliputi jenis dan frekuensi kejahatan maritim, tingkat penanganan kasus, pola patroli, koordinasi antar lembaga, serta mekanisme pertukaran informasi dan pelatihan personel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi sinergi kedua lembaga melalui metode SWOT (Aziz and Wijaya, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, berupa analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi dan fenomena yang terjadi, serta kuantitatif sederhana untuk memvisualisasikan data frekuensi dan tingkat penanganan kasus kejahatan maritim (Rahmawati and Rahayu, 2021). Pendekatan ini memungkinkan penelitian menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktis untuk mendukung pengambilan keputusan dalam kebijakan keamanan maritim nasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ALKI II merupakan salah satu jalur pelayaran strategis dengan tingkat lalu lintas kapal yang

sangat tinggi, baik kapal niaga, kapal ikan, maupun kapal militer dari berbagai negara. Berdasarkan data dari TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI, dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan aktivitas pelayaran sebesar rata-rata 8-10 persen per tahun (Wijaya *et al.*, 2022). Namun, peningkatan ini juga diikuti oleh meningkatnya potensi ancaman keamanan maritim seperti penyelundupan narkotika, pelanggaran wilayah oleh kapal asing, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, serta penyalahgunaan jalur pelayaran (Lubis and Pratama, 2023). Secara geografis, ALKI II melintasi kawasan laut yang luas dan kompleks, mencakup perairan Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku, sehingga memerlukan sistem pengawasan yang efektif serta koordinasi antarinstansi yang kuat dalam pelaksanaan patroli dan penegakan hukum di laut (Syamsul and Alam, 2021).

Sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI dalam menjaga keamanan di wilayah ALKI II diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama strategis. Kerja sama tersebut meliputi pelaksanaan patroli bersama untuk meningkatkan kehadiran unsur keamanan laut, pertukaran dan integrasi informasi maritim melalui sistem komando dan kendali masing-masing lembaga, koordinasi dalam operasi gabungan untuk menangani kasus pelanggaran hukum, serta kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas personel guna memperkuat kemampuan teknis dan pemahaman hukum laut internasional (D. Setiawan, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia (Budi, 2022). Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal sinkronisasi komando, pembagian kewenangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana, terutama kapal patroli jarak jauh dan sistem pengawasan berbasis teknologi (Purnomo, 2023).

Melalui analisis SWOT, diperoleh gambaran bahwa kekuatan utama sinergitas TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI terletak pada kemampuan pertahanan maritim yang kuat, jaringan pengawasan hukum laut yang luas, serta profesionalisme personel yang tinggi (Kurniawan and Setiawan, 2021). Sementara itu, kelemahannya terdapat pada belum adanya sistem komando terpadu yang

sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan anggaran operasional, dan koordinasi lintas lembaga yang masih bersifat sectoral (Dwi, 2020). Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti dukungan kebijakan pemerintah terhadap penguatan sektor maritim, kemajuan teknologi pengawasan laut, serta peningkatan kerja sama internasional (Raharjo, 2023). Adapun ancaman yang dihadapi meliputi meningkatnya aktivitas ilegal lintas batas, persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, dan potensi eksplorasi jalur pelayaran oleh pihak asing (Siregar, 2022).

Hasil pemetaan strategi menggunakan pendekatan pemodelan struktural interpretatif (ISM) menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap peningkatan sinergi adalah pembentukan sistem komando dan kendali terpadu antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI. Faktor ini menjadi dasar bagi strategi lain seperti peningkatan frekuensi patroli bersama, integrasi sistem informasi maritim, dan penguatan kemampuan sumber daya manusia (Riki, 2023). Strategi jangka menengah yang perlu diprioritaskan adalah pengembangan teknologi pengawasan laut berbasis satelit dan penyusunan protokol operasi lintas lembaga. Untuk jangka panjang, fokus diarahkan pada penguatan kerja sama internasional dan pembentukan kebijakan nasional keamanan maritim yang terintegrasi secara menyeluruh (Purwanto, 2022).

Sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI di ALKI II telah menunjukkan perkembangan positif dalam lima tahun terakhir, terutama dalam hal patroli bersama, pertukaran informasi, dan penegakan hukum. Namun, peningkatan efektivitas kerja sama masih memerlukan perbaikan dalam aspek koordinasi kelembagaan, integrasi sistem informasi, serta penguatan sumber daya manusia dan teknologi (Firmansyah, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi strategis yang terencana dan terstruktur antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI merupakan kunci utama dalam menjaga keamanan dan stabilitas maritim nasional, khususnya di wilayah strategis seperti ALKI II yang memiliki nilai ekonomi, politik, dan pertahanan yang sangat penting bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pembahasan

ALKI II merupakan wilayah maritim yang sangat rentan terhadap berbagai ancaman karena kombinasi posisi geografis yang strategis, tingginya intensitas pelayaran internasional, dan keberadaan sumber daya kelautan yang menarik perhatian aktor non-negara (Sihombing, 2021). Data lima tahun terakhir menunjukkan frekuensi berulang kasus perompakan sekitar 27 kasus, penyelundupan narkotika sekitar 19 kasus, serta penangkapan ikan ilegal sekitar 23 kasus, yang menggambarkan pola ancaman yang bersifat transnasional, adaptif, dan beragam (Nasution, 2022). Pola ini menandakan bahwa pelaku kejahatan maritim memanfaatkan celah pengawasan, waktu transit yang panjang, dan kompleksitas yurisdiksi di laut untuk menjalankan operasi ilegalnya (Gunawan, 2020). Oleh karena itu, upaya pengamanan tidak dapat hanya bersifat reaktif; diperlukan pendekatan preventif yang didukung intelijen, teknologi pengawasan, serta keterlibatan pemangku kepentingan lokal untuk menutup celah-celah operasional pelaku.

1. Analisis terhadap wujud sinergi antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI.

Analisis terhadap wujud sinergi antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas pengamanan maritim, khususnya di wilayah strategis ALKI II (Ambarita, 2023). Sinergi tersebut tercermin melalui kegiatan patroli bersama, koordinasi operasi di lapangan, pertukaran informasi, serta pelatihan gabungan antar personel. Pelaksanaan patroli bersama berperan penting dalam menunjukkan kehadiran negara di laut dan berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti perompakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan secara ilegal. Dalam situasi tertentu, kedua lembaga juga telah melakukan koordinasi operasi melalui pembagian sektor patroli, penetapan prosedur komunikasi yang seragam, serta peningkatan dukungan intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman di wilayah laut strategis (Firdaus, 2020). Selain itu, kegiatan pelatihan bersama menjadi wadah untuk memperkuat kemampuan personel dalam aspek teknis, taktis, dan koordinatif, sehingga mampu

menciptakan interoperabilitas antar lembaga dalam pelaksanaan operasi keamanan maritim.

Sinergi antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI masih menghadapi sejumlah hambatan baik dari sisi struktural, operasional, maupun sumber daya. Hambatan utama yang ditemukan adalah perbedaan sistem komando dan kendali yang menyebabkan koordinasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif. TNI Angkatan Laut memiliki sistem komando yang bersifat hierarkis dan militeristik, sedangkan BAKAMLA RI beroperasi dengan pendekatan koordinatif di bawah sistem pemerintahan sipil (Dharmawan, 2021). Perbedaan pola komando ini sering kali menimbulkan kendala dalam menentukan otoritas operasi bersama, terutama pada kondisi darurat atau situasi yang memerlukan keputusan cepat. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum di laut, yang berdampak pada duplikasi kegiatan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya. Hambatan lain yang juga menonjol adalah keterbatasan sarana patroli dan sistem pemantauan maritim jarak jauh yang belum memadai, sehingga tidak semua wilayah ALKI II dapat diawasi secara optimal dan berkesinambungan.

Selain kendala struktural dan teknis, faktor kelembagaan dan budaya organisasi turut memengaruhi efektivitas sinergi kedua lembaga tersebut. Perbedaan doktrin, prosedur kerja, dan ego sektoral menjadi penghalang tersendiri dalam mewujudkan koordinasi yang solid dan berkelanjutan (M. Setiawan, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang menegaskan mekanisme kerja sama antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI secara lebih jelas dan terpadu, termasuk pembentukan pusat komando gabungan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi strategis dan operasional. Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan melalui pelatihan terpadu, pendidikan lintas lembaga, dan pertukaran personel untuk membangun kesamaan persepsi serta memperkuat kepercayaan antar institusi (Sugito, 2020). Dengan penguatan integrasi kelembagaan, perbaikan mekanisme komunikasi dan

koordinasi operasi, serta peningkatan kapasitas personel dan sarana pengawasan laut, sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI diharapkan mampu berkembang menjadi sistem keamanan maritim nasional yang tangguh, efektif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mempertahankan kedaulatan Indonesia di laut serta menjaga stabilitas dan ketertiban di kawasan maritim nasional.

2. Analisis SWOT

Hasil analisis menggunakan pendekatan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) memperlihatkan secara jelas peta strategis yang menggambarkan posisi sinergi antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI dalam menghadapi ancaman keamanan maritim di ALKI II. Dari sisi kekuatan, TNI Angkatan Laut memiliki kapabilitas militer yang mumpuni, meliputi kemampuan tempur laut, dukungan logistik, infrastruktur pangkalan, serta sistem komando dan kendali yang terstruktur dengan baik. Kekuatan ini diperkuat dengan kemampuan manuver dan kehadiran yang tinggi di laut, sehingga mampu memberikan efek penangkal terhadap ancaman militer maupun nonmiliter (Hadi, 2023). Di sisi lain, BAKAMLA RI memiliki jaringan pengawasan dan penegakan hukum maritim yang luas, dengan fokus pada aspek keamanan dan keselamatan pelayaran. Keduanya memiliki keunggulan kompetitif yang saling melengkapi, di mana TNI Angkatan Laut lebih menekankan aspek pertahanan dan kedaulatan negara, sementara BAKAMLA RI berperan dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan penegakan hukum di laut (Wulan, 2021). Jika kedua kekuatan ini mampu disinergikan secara optimal, maka pengawasan dan pengendalian di wilayah strategis seperti ALKI II akan menjadi lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ancaman.

Kelemahan yang ditemukan dalam analisis SWOT menunjukkan bahwa sinergi tersebut masih terhambat oleh persoalan kelembagaan dan keterbatasan sumber daya. Aspek kelembagaan yang dimaksud meliputi belum adanya struktur komando terpadu yang secara formal mengatur mekanisme koordinasi operasi, pembagian wilayah tanggung jawab, serta prosedur

pengambilan keputusan pada kondisi darurat (Mahendra, 2021). Hal ini sering menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan dalam respons terhadap kejadian di lapangan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kapal patroli jarak jauh, fasilitas komunikasi taktis, dan sistem pemantauan berbasis data terintegrasi, juga menjadi faktor pembatas efektivitas operasi. Sumber daya manusia pun menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal jumlah personel yang terlatih secara khusus untuk menangani ancaman lintas batas seperti perompakan, penyelundupan narkotika, dan perdagangan manusia di laut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia menjadi langkah prioritas untuk memperkuat fondasi sinergi antarlembaga.

Terdapat dukungan yang kuat dari kebijakan nasional terhadap upaya penguatan keamanan maritim, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan berbagai strategi pemerintah terkait Poros Maritim Dunia (Yuliana, 2022). Perkembangan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi maritim juga membuka peluang besar bagi peningkatan kemampuan deteksi dan respons dini terhadap ancaman. Selain itu, kerja sama internasional melalui forum seperti ASEAN Maritime Forum, Western Pacific Naval Symposium (WPNS), serta kerja sama bilateral dengan negara tetangga memberikan ruang strategis bagi peningkatan kapasitas dan interoperabilitas dalam menjaga stabilitas kawasan (Purwanto, 2022). Namun, di sisi lain, ancaman eksternal yang terus berkembang tidak dapat diabaikan. Adaptasi modus operandi kejahatan maritim seperti penyelundupan narkotika menggunakan kapal kecil berkecepatan tinggi atau kapal nelayan tradisional menunjukkan bahwa ancaman semakin sulit dideteksi dan ditindak. Tekanan geopolitik dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan terhadap jalur perdagangan internasional juga menimbulkan potensi friksi di wilayah laut Indonesia (Rizki, 2023). Selain itu, eksploitasi sumber daya laut oleh kapal asing secara ilegal berpotensi menimbul-

kan kerugian ekonomi dan ekologis yang signifikan.

Keberhasilan pengamanan ALKI II sangat bergantung pada kemampuan TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI dalam mengonversi kekuatan dan peluang menjadi tindakan strategis yang konkret dan terukur. Kekuatan militer dan pengawasan hukum harus dipadukan melalui sistem koordinasi yang solid, sementara peluang kebijakan dan kerja sama internasional harus dimanfaatkan untuk menutup kelemahan internal serta mengurangi paparan terhadap ancaman eksternal (Fadil, 2020). Dengan strategi yang berbasis pada analisis SWOT ini, diharapkan sinergi antara kedua lembaga dapat berkembang menjadi model pengelolaan keamanan maritim yang berkelanjutan, adaptif terhadap dinamika geopolitik kawasan, dan mampu memastikan bahwa ALKI II tetap aman, tertib, serta berada di bawah kendali penuh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hendra, 2021).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan maritim di ALKI II. Bentuk kerja sama seperti patroli bersama, pertukaran informasi, dan pelatihan gabungan terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum di laut. Namun, masih terdapat kendala seperti tumpang tindih kewenangan, perbedaan sistem komando, dan keterbatasan sarana patroli yang menghambat koordinasi optimal di lapangan.
2. Analisis SWOT memperlihatkan bahwa kekuatan utama terletak pada kemampuan operasional TNI Angkatan Laut dan jaringan pengawasan BAKAMLA RI, sementara kelemahan utama berada pada aspek kelembagaan dan sumber daya. Peluang berupa dukungan kebijakan nasional, kemajuan teknologi, serta kerja sama internasional dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi, sedangkan ancaman eksternal seperti kejahatan lintas negara dan tekanan geopolitik menuntut kerja sama yang lebih solid dan berkelanjutan.

3. Keberhasilan pengamanan ALKI II ber-gantung pada kemampuan kedua lembaga mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada untuk menutup kelemahan serta menghadapi ancaman bersama. Sinergitas yang kuat akan menjadi pondasi penting dalam menjaga stabilitas, keadautan, dan keamanan maritim nasional.

B. Saran

1. Meningkatkan koordinasi dan sistem komando terpadu antara TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI. Sinergi operasional akan berjalan lebih efektif apabila terdapat sistem komando yang terintegrasi dan mekanisme koordinasi yang jelas.
2. Memperkuat pelatihan dan pertukaran personel. Penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam membangun kesamaan persepsi, pemahaman taktik, dan profesionalisme di lapangan. Program pelatihan gabungan, pertukaran penugasan, serta latihan bersama akan meningkatkan kemampuan koordinasi dan mempererat hubungan kerja antar lembaga, sehingga respons terhadap ancaman maritim dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
3. Menambah dan memodernisasi sarana patroli serta sistem pengawasan maritim. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kapal patroli jarak jauh dan peralatan komunikasi modern, seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi keamanan laut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas armada, modernisasi peralatan pemantauan, serta integrasi sistem komunikasi dan deteksi maritim untuk mendukung pelaksanaan patroli dan penegakan hukum yang berkelanjutan di ALKI II.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambarita, P. (2023) 'Sinergitas TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA RI dalam Keamanan Laut', *Journal of Naval Studies*, 19(3), pp. 144-157.
- Arif, M. and Kurniawan, A. (2018) 'The Navy-Coast Guard Nexus and the Nature of Indonesian Maritime Security Governance', *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 11(4), pp. 215-228.
- Arifansyah, A. (2024) *BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard*. Cogitatio Press.

- Aziz, T. and Wijaya, P. (2020) 'Analisis Sinergitas dalam Penanganan Kejahatan Maritim', *Jurnal Hukum Maritim*, 9(4), pp. 185–192.
- Budi, F. (2022) 'Peran Patroli Bersama dalam Pengawasan Laut Indonesia', *Journal of Maritime Security*, 28(1), pp. 47–58.
- Chairil, T. (2024) *Indonesia's Maritime Security Governance*. Atlantis Press.
- Corporation, R. (2018) *A Preliminary Assessment of Indonesia's Maritime Security*.
- Dharmawan, P. (2021) 'Perbedaan Sistem Komando TNI dan BAKAMLA', *Jurnal Keamanan Nasional*, 19(4), pp. 177–188.
- Dwi, H. (2020) 'Koordinasi Lintas Lembaga dalam Pengawasan Laut', *Journal of Public Administration and Security*, 32(4), pp. 67–79.
- Fadil, A. (2020) 'Mengoptimalkan Kekuatan TNI Angkatan Laut dalam Keamanan Laut', *Jurnal Keamanan Laut*, 18(3), pp. 123–135.
- Firdaus, A. (2020) 'Koordinasi Operasi Keamanan Maritim oleh TNI dan BAKAMLA', *Jurnal Operasi Maritim*, 13(2), pp. 142–155.
- Firmansyah, R. (2022) 'Koordinasi Kelembagaan dalam Keamanan Laut', *Jurnal Administrasi dan Keamanan*, 21(2), pp. 102–115.
- Gunawan, S. (2020) 'Ancaman Transnasional dan Adaptasi Kejahatan Maritim', *Journal of International Security*, 15(2), pp. 98–110.
- Hadi, M. (2023) 'Pengaruh Kehadiran TNI Angkatan Laut dalam Keamanan Laut', *Jurnal Pertahanan Laut*, 30(2), pp. 116–128.
- Hendra, P. (2021) 'Model Pengelolaan Keamanan Laut di Indonesia', *Jurnal Maritim Indonesia*, 24(4), pp. 94–106.
- Hidayat, A.S. et al. (2025) 'The Impact of Command And Control Effectiveness On The Realization Of Maritime Security In ALKI II, Indonesia', *Journal of Maritime Research*, 22(1), pp. 184–191.
- Kurniawan, M. and Setiawan, P. (2021) 'Kekuatan dan Kelemahan Sistem Keamanan Laut Indonesia', *Jurnal Maritim dan Pertahanan*, 29(2), pp. 98–110.
- Listiyono, Y. et al. (2021) 'Marine Defense Strategy in Securing Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) to Realize Maritime Safety and Maintain Indonesian Sovereignty', *International Journal of Education and Social Science Research*, 4(3), pp. 224–225.
- Lubis, T. and Pratama, R. (2023) 'Ancaman Keamanan Maritim di ALKI II', *Jurnal Keamanan Laut*, 15(1), pp. 65–80.
- Mahendra, T. (2021) 'Pentingnya Struktur Komando Terpadu dalam Keamanan Laut', *Jurnal Keamanan Laut*, 20(1), pp. 57–69.
- Nasution, I. (2022) 'Keamanan Maritim di ALKI II: Tren Kejahatan Maritim', *Journal of Maritime Security*, 22(4), pp. 112–125.
- Purnomo, A. (2023) 'Kendala dalam Penegakan Hukum Laut di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 34(3), pp. 112–130.
- Purwanto, M. (2022) 'Kerja Sama Internasional dalam Keamanan Maritim', *International Maritime Security Journal*, 28(1), pp. 77–89.
- Raharjo, T. (2023) 'Peluang dan Tantangan Keamanan Maritim Indonesia', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 40(5), pp. 214–225.
- Rahmawati, S. and Rahayu, A. (2021) 'Teknik Analisis Data dalam Penelitian Keamanan Laut', *Jurnal Analisis Keamanan*, 12(1), pp. 75–80.
- Riki, W. (2023) 'Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam Keamanan Laut', *Jurnal Pendidikan Keamanan Laut*, 19(2), pp. 88–99.
- Rizki, D. (2023) 'Geopolitik Keamanan Laut di Indo-Pasifik', *Jurnal Keamanan Laut*, 32(2), pp. 112–124.
- Setiawan, D. (2019) 'Metodologi Penelitian dalam Keamanan Maritim Indonesia', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), pp. 112–118.
- Setiawan, D. (2020) 'Sinergitas TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA dalam Pengawasan Laut', *Jurnal Keamanan Nasional*, 23(4), pp. 178–192.
- Setiawan, M. (2020) 'Perbedaan Budaya Organisasi dalam Keamanan Maritim', *Jurnal Manajemen Keamanan*, 30(2), pp.

- 150–162.
- Sihombing, R. (2021) 'Strategi Keamanan Laut di ALKI II', *Jurnal Ilmu Kelautan*, 35(3), pp. 147–160.
- Siregar, L. (2022) 'Geopolitik dan Keamanan Laut di Indo-Pasifik', *Jurnal Keamanan Internasional*, 27(1), pp. 134–146.
- Sugito, R. (2020) 'Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Keamanan Laut', *Jurnal Pendidikan Keamanan Laut*, 18(4), pp. 125–137.
- Suryo, L. (2021) 'Sinergitas Penegakan Hukum Maritim di Indonesia', *Jurnal Keamanan Laut*, 10(3), pp. 102–110.
- Syamsul, H. and Alam, Z. (2021) 'Keamanan Maritim dan Tantangannya di Selat Makassar dan Laut Sulawesi', *Jurnal Geografi dan Maritim*, 30(2), pp. 234–250.
- Wijaya, A. et al. (2022) 'Perkembangan dan Tantangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II', *Jurnal Ilmu Kelautan*, 40(3), pp. 112–125.
- Wulan, F. (2021) 'Peran BAKAMLA dalam Penegakan Hukum Laut', *Journal of Maritime Law Enforcement*, 18(1), pp. 73–85.
- Yuliana, R. (2022) 'Kebijakan Penguatan Keamanan Maritim Indonesia', *Journal of National Security*, 40(2), pp. 130–142.